

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Standar pelayanan kefarmasian di puskesmas diatur dalam PMK (Peraturan Menteri Kesehatan) No. 74 Tahun 2016 yang merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan. Pelayanan kefarmasian merupakan kegiatan yang terpadudengan tujuan untuk mengidentifikasi, mencegah dan menyelesaikan masalah obat dan masalah yang berhubungan dengan kesehatan. Pelayanan farmasi ini dikelola oleh instalasi farmasi dibawah pimpinan seorang apoteker yang bertanggung jawab kepada Kepala puskesmas. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan danteknologi sertameningkatnya harapan konsumen akan pelayanan yang lebih baik, telah terjadi perubahan orientasi pelayanan farmasi di puskesmas yang semula berorientasi pada produk menjadi berorientasi pada pasien (Permenkes, 2016).

Sistem kesehatan nasional adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Sistem Kesehatan Nasional (SKN) 2016, disebutkan pembangunan kesehatan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud.

Kondisi kesehatan yang optimal dari seseorang atau masyarakat di suatu negara akan memberikan kemampuan yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan hidup tersebut mencakup kebutuhan terhadap pendidikan dan ekonomi yang pada gilirannya akan berdampak pada meningkatnya kualitas sumber daya manusia sebagai pelaku pembangunan (Depkes RI, 2016).

Kondisi kesehatan yang optimal dapat dicapai melalui upaya kesehatan yang mencakup pendekatan pemeliharaan, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan yang di lakukan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. Pendekatan penyembuhan penyakit dan pemulihan

merupakan pendekatan yang membutuhkan ketersediaan obat yang aman dan memadai. Hal ini diatur dalam kebijakan Obat Nasional (KONAS) yang dikeluarkan oleh pemerintah pada tahun 2016 (Depkes RI, 2016).

Pengelolaan obat menurut WHO, menitikberatkan pada hubungan antara pemilihan obat, pengadaan obat, penyimpanan dan pendistribusian obat serta penggunaan obat, dimana pengelolaan menjadi kuat jika didukung oleh sistem manajemen pengelolaan obat yang baik (Hartono, 2015).

Pengelolaan obat di puskesmas merupakan hal yang sangat penting yang perlu diperhatikan, mengingat dengan pengelolaan yang tidak sesuai dengan prosedur yang tepat akan terjadi masalah tumpang tindih anggaran dan pemakaian yang tidak tepat guna.

Masalah ketersediaan obat sering dijumpai pada pelayanan kesehatan di Puskesmas. Sementara itu, rasionalitas persepsian merupakan hal penting dalam keberhasilan terapi pada pasien.

Ketersediaan diperkirakan mempunyai hubungan dengan penggunaan obat yang rasional, bahwa dokter, pasien, ketersediaan obat dan kualitas pelayanan merupakan siklus yang saling berpengaruh. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO, penggunaan obat yang rasional adalah apabila pasien menerima pengobatan sesuai dengan kebutuhan klinisnya, dalam dosis yang sesuai dengan kebutuhan, dalam periode yang sesuai dan dengan biaya yang terjangkau oleh dirinya dan kebanyakan masyarakat. Secara praktis, rasionalitas persepsian diukur dengan beberapa indikator yaitu tepat diagnosis, tepat pemilihan obat, tepat indikasi, tepat pasien, tepat dosis, tepat cara dan lama pemberian, tepat harga, tepat informasi serta waspada efek samping obat.

Apoteker yang secara legalitas formal diberikan kewenangan oleh Negara untuk melakukan pekerjaan kefarmasian berupa pengelolaan obat dan kegiatan farmasi klinik, berada dalam posisi yang strategis untuk meminimalkan kesalahan pengobatan akibat dari persepsian yang tidak rasional.

Menurut peneliti Sunandar Ihsan 2014 hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa tidak semua obat sesuai antara laporan fisik yang tertera dalam laporan stok opname per 31 Desember 2014 dengan pembukuannya yang tertera pada kartu stok obat. Hal ini menunjukkan bahwa proses pencatatan obat yang masuk ataupun keluar di Instalasi Farmasi RSUD Kabupaten Muna masih perlu ditingkatkan. Adanya penyimpangan diakibatkan oleh kurangnya tenaga

administrasi yang ada di IFRSUD Kabupaten Muna. Untuk menangani masalah tersebut, pada tahun 2015 IFRSUD telah melakukan perbaikan terhadap setiap aspek yang berkaitan dengan administrasi dan pencatatan obat dengan melakukan komputersisasi terhadap data obat yang ada di Rumah Sakit. Permasalahan ketersediaan obat dengan penggunaan obat yang rasional menjadi hal yang penting untuk dilakukan penelitian agar diperoleh data yang tepat sehingga bisa menjadi masukan bagi penyelenggara pelayanan kesehatan. Dari hasil pengamatan peneliti sebelumnya terhadap ketersediaan obat Paracetamol dan Glyceryl Guaiacolate di Puskesmas Pembantu Balam tidak sesuai antara permintaan resep obat Paracetamol dan Glyceryl Guaiacolate dengan pemberian obat tersebut dikarenakan ketidakcukupan obat tersebut. Berdasarkan latar belakang diatas , maka perlu dilakukan penelitian dengan dilakukan penelitian dengan judul “Rasio Ketersediaan Obat Paracetamol Dan Glyceryl Guaiacolate Dengan Resep Dokter Di Puskesmas Pembantu Balam Tahun 2019”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu, Bagaimanakah rasio ketersediaan obat Paracetamol dan Glyceryl Guaiacolate dengan resep dokter di Puskesmas Pembantu Balam Tahun 2019?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui rasio ketersediaan obat Paracetamol dan Glyceryl Guaiacolate dengan resep dokter di Puskesmas Pembantu Balam Tahun 2019.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui ketersediaan obat Paracetamol dengan resep dokter di Puskesmas Pembantu Balam.

2. Untuk mengetahui ketersediaan obat Glyceryl Guaiacolate dengan resep dokter di Puskesmas Pembantu Balam.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Instansi terkait sebagai bahan masukan dalam hal penyediaan obat Paracetamol dan Glyceryl Guaiacolate.
2. Untuk mengetahui apakah rasio ketersediaan obat Paracetamol dan Glyceryl Guaiacolate sesuai jumlah stoknya dengan adanya resep dokter yang dikeluarkan di Puskesmas Pembantu Balam.
3. Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan rasio ketersediaan obat